

Ketimpangan Upah dalam Industri Garmen Global: Implikasi *Human Security* bagi Buruh di Negara Berkembang

A. Azizah Gathfani Batari

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 24 June 2026

Available online 23 June 2026

Keywords

Wage Inequality; Global Garment Industry; Human Security; Workers in Developing Countries.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Abstract: The global garment industry is one of the sectors most clearly reflecting the dynamics of economic globalization and the formation of global supply chains. This study aims to analyze wage inequality in the global garment industry and its implications for the human security of workers in developing countries, with a focus on Indonesia. Using a qualitative approach through library research, this study examines secondary data from scientific journals, international organization reports, government documents, and other credible sources. The findings show that wage inequality in the garment industry is not merely an economic issue but is deeply rooted in the structure of global production chains that place developing countries in a subordinate position. Multinational companies retain high-value activities such as design and branding in developed countries while relocating labor-intensive production to developing countries offering lower wage costs. This wage inequality has broad implications for multiple dimensions of human security, including economic security, health security, personal security, and community security of garment workers. Structural solutions involving governments, international organizations, multinational companies, trade unions, and civil society are needed to address this issue comprehensively. Keywords: Wage Inequality, Global Garment Industry, Human Security, Developing Countries, Global Supply Chain.

ABSTRAK

Abstrak: Industri garmen global merupakan salah satu sektor yang paling jelas mencerminkan dinamika globalisasi ekonomi dan pembentukan rantai produksi global. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan upah dalam industri garmen global serta implikasinya terhadap human security buruh di negara berkembang, dengan fokus pada Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research), penelitian ini mengkaji data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen pemerintah, dan sumber kredibel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan upah dalam industri garmen bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan berakar pada struktur rantai produksi global yang menempatkan negara berkembang pada posisi subordinat. Perusahaan multinasional mempertahankan aktivitas bernilai tinggi seperti desain dan merek di negara maju, sementara produksi padat karya dipindahkan ke negara berkembang dengan biaya tenaga kerja rendah. Ketimpangan upah ini memiliki implikasi luas terhadap berbagai dimensi human security, mencakup economic security, health security, personal security, dan community security buruh garmen. Diperlukan solusi struktural yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, perusahaan multinasional, serikat pekerja, dan masyarakat sipil untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif. Kata Kunci: Ketimpangan Upah, Industri Garmen Global, Human Security, Negara Berkembang, Rantai Pasok Global.

PENDAHULUAN

Industri garmen merupakan sektor manufaktur yang mencerminkan berubahnya pola produksi industri dunia secara signifikan yang menghubungkan perusahaan multinasional sebagai pusat produksi dengan negara-negara berkembang melalui terbentuknya rantai pasok global atau *global supply chain*. Dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi perdagangan bebas, fragmentasi produksi global, dan strategi “fast fashion” oleh merek-merek global telah mengokohkan posisi rantai pasok garmen sebagai mesin penciptaan lapangan kerja dan ekspor. Namun, pertumbuhan volume produksi sering kali disertai tekanan sistemik untuk menekan biaya, yang diwujudkan melalui penetapan harga di tingkat pembeli, kompetisi antar-pemasok,

dan praktik sourcing berbasis kontrak jangka pendek. Kondisi ini berkontribusi pada upah rendah, jam kerja panjang, serta fenomena yang berulang tercatat di negara-negara seperti Bangladesh, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia.

Di Indonesia, industri garmen berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat persoalan struktural berupa ketimpangan upah yang masih dialami oleh para buruh garmen. Meskipun sektor ini menghasilkan nilai ekonomi yang besar dalam rantai produksi global, sebagian pekerja masih menerima upah yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keuntungan yang diperoleh pelaku industri dengan kesejahteraan tenaga kerja yang menjadi penggerak utama proses produksi.

Persoalan upah rendah dalam industri garmen tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada berbagai dimensi keamanan manusia atau *human security*. Selain menghadapi keterbatasan pendapatan, buruh garmen kerap dihadapkan pada kondisi kerja yang rentan, seperti jam kerja yang panjang, perlindungan keselamatan kerja yang kurang memadai, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Buruh perempuan, yang mendominasi tenaga kerja di sektor ini, sering kali menghadapi kerentanan yang lebih besar berupa diskriminasi upah, hambatan dalam memperoleh hak reproduksi dan cuti kerja, serta risiko kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan upah dalam industri garmen memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas hidup, kesejahteraan, dan keamanan para pekerja.

Dalam perspektif *human security*, keamanan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga mencakup jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan martabat individu. Oleh karena itu, rendahnya tingkat upah yang disertai dengan berbagai bentuk kerentanan kerja dapat dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan manusia buruh garmen di negara berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan upah dalam industri garmen global dengan fokus pada kondisi buruh di negara berkembang, khususnya Indonesia, serta mengkaji implikasinya terhadap *human security*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik upah rendah dalam industri garmen dan menganalisis dampaknya terhadap berbagai dimensi keamanan manusia yang dialami oleh para pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk menganalisis ketimpangan upah dalam industri garmen global serta implikasinya terhadap *human security* buruh di negara berkembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan organisasi internasional, dokumen resmi pemerintah, publikasi lembaga swadaya masyarakat, serta berita dari media kredibel yang berkaitan dengan industri garmen global, ketenagakerjaan, dan *human security*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan *dokumenter John Pilger Exposes Indonesian Sweat Shops Backed by the IMF* sebagai sumber pendukung untuk memberikan gambaran mengenai kondisi buruh garmen dalam konteks globalisasi ekonomi dan relasi antara investasi internasional dengan kesejahteraan tenaga kerja di negara berkembang. Namun, dokumenter tersebut tidak dijadikan sebagai sumber utama penelitian, melainkan sebagai ilustrasi historis yang memperkaya analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari sumber akademik dan institusi yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti laporan dari *International Labour Organization*, *World*

Bank, United Nations Development Programme, serta penelitian terdahulu yang membahas industri garmen global, upah buruh, dan konsep *human security*.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu posisi negara berkembang dalam industri garmen global, fenomena ketimpangan upah, faktor-faktor penyebab ketimpangan upah, perbandingan kesejahteraan buruh antara negara berkembang dan negara maju, serta implikasinya terhadap *human security*. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep *human security* untuk mengidentifikasi dampak ketimpangan upah terhadap berbagai dimensi keamanan manusia.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekonomi politik global dalam memahami hubungan antara perusahaan multinasional, negara berkembang, dan tenaga kerja dalam rantai produksi global (*global supply chain*). Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana struktur ekonomi global dan persaingan investasi dapat memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan serta berkontribusi terhadap terciptanya ketimpangan upah di sektor garmen.

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara ketimpangan upah dalam industri garmen global dan ancaman terhadap *human security* buruh di negara berkembang, sekaligus mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam sistem produksi global yang semakin terintegrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Upah dalam Struktur Industri Garmen Global

Industri garmen merupakan salah satu sektor yang paling mencerminkan dinamika globalisasi ekonomi dan pembentukan rantai produksi global (*global supply chain*). Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan-perusahaan garmen multinasional memindahkan aktivitas produksinya ke negara-negara berkembang yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah. Negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, dan India menjadi pusat produksi berbagai merek pakaian internasional karena memiliki keunggulan komparatif berupa tenaga kerja yang melimpah dengan tingkat upah yang relatif murah. Di sisi lain, aktivitas yang menghasilkan nilai tambah terbesar, seperti desain produk, pemasaran, distribusi, dan penguasaan merek, tetap terkonsentrasi di negara-negara maju tempat perusahaan induk beroperasi.

Kondisi tersebut menciptakan distribusi keuntungan yang tidak seimbang dalam rantai produksi global. Perusahaan multinasional memperoleh keuntungan yang besar melalui penguasaan merek dan pasar internasional, sementara buruh di negara berkembang yang terlibat langsung dalam proses produksi hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan upah dalam industri garmen bukan sekadar persoalan hubungan antara pekerja dan perusahaan, melainkan merupakan bagian dari struktur ekonomi global yang menempatkan negara berkembang pada posisi yang kurang menguntungkan.

Posisi Indonesia dalam industri garmen global tidak berbeda jauh dengan negara berkembang lainnya. Industri garmen menjadi salah satu sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. Namun, untuk mempertahankan daya saing di pasar internasional, industri ini sering kali mengandalkan strategi biaya produksi rendah, termasuk melalui pengendalian upah tenaga kerja. Persaingan antarnegara berkembang dalam menarik investasi asing juga mendorong munculnya fenomena *race to the bottom*, yaitu kondisi ketika negara-negara berupaya mempertahankan biaya tenaga kerja yang rendah agar tetap kompetitif di mata investor global. Dalam situasi tersebut, kesejahteraan buruh sering kali ditempatkan sebagai prioritas kedua dibandingkan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi.

Fenomena upah minimum rendah yang dialami buruh garmen di berbagai negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara kepentingan perusahaan multinasional dan kebijakan negara. Dari perspektif perusahaan multinasional, upah tenaga kerja dipandang

sebagai salah satu komponen biaya produksi yang harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk memindahkan produksi ke negara lain yang menawarkan biaya lebih murah menciptakan tekanan terhadap negara-negara berkembang untuk mempertahankan tingkat upah yang rendah. Di sisi lain, pemerintah negara berkembang sering kali berada dalam posisi dilematis antara melindungi kesejahteraan pekerja dan mempertahankan daya tarik investasi. Akibatnya, kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan sering kali lebih berorientasi pada stabilitas ekonomi dan kepentingan investasi daripada peningkatan kesejahteraan buruh secara menyeluruh.

Ketimpangan Kesejahteraan Buruh antara Negara Berkembang dan Negara Maju

Ketimpangan upah dalam industri garmen global semakin terlihat apabila dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan pekerja di negara-negara maju. Meskipun pekerja di negara maju juga menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja modern, mereka umumnya memperoleh perlindungan tenaga kerja yang lebih baik melalui sistem hukum dan kebijakan sosial yang lebih kuat. Negara-negara maju seperti Jerman, Swedia, dan Belanda memiliki standar upah yang lebih tinggi, jaminan kesehatan yang komprehensif, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta peran serikat buruh yang relatif kuat dalam proses negosiasi hubungan industrial.

Sebaliknya, buruh di negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses perlindungan yang serupa. Upah minimum yang berlaku di banyak negara berkembang masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak, sehingga pekerja harus mengandalkan lembur atau pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Selain itu, sistem kerja kontrak dan outsourcing yang semakin meluas menyebabkan tingkat kepastian kerja menjadi rendah dan meningkatkan kerentanan pekerja terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat produktivitas atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh orientasi kebijakan negara dalam melindungi tenaga kerja. Negara-negara maju cenderung menempatkan perlindungan pekerja sebagai bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi, sedangkan banyak negara berkembang masih menghadapi tekanan untuk mempertahankan daya saing melalui biaya tenaga kerja yang rendah. Akibatnya, ketimpangan kesejahteraan antara buruh di negara maju dan negara berkembang terus berlanjut meskipun keduanya terhubung dalam sistem produksi global yang sama.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam globalisasi ekonomi. Di satu sisi, integrasi ekonomi global membuka peluang pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang. Namun di sisi lain, manfaat yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata. Buruh yang menjadi aktor utama dalam proses produksi justru sering kali berada pada posisi yang paling rentan dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut.

Implikasi Ketimpangan Upah terhadap *Human Security* dan Upaya Penanganannya

Fenomena tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam globalisasi ekonomi. Di satu sisi, integrasi ekonomi global membuka peluang pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang. Namun di sisi lain, manfaat yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata. Buruh yang menjadi aktor utama dalam proses produksi justru sering kali berada pada posisi yang paling rentan dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dari aspek economic security, upah yang rendah membatasi kemampuan buruh untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan transportasi. Keterbatasan pendapatan juga meningkatkan risiko kemiskinan dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempersempit peluang mobilitas sosial dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

Selain itu, ketimpangan upah juga berdampak pada health security. Pendapatan yang terbatas membuat banyak buruh kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Kondisi kerja yang berat, jam kerja yang panjang, serta tekanan produksi yang tinggi turut meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik maupun mental. Tidak sedikit pekerja yang tetap bekerja dalam kondisi sakit karena khawatir kehilangan pendapatan atau bahkan pekerjaannya.

Dari sisi personal security, ketidakpastian kerja akibat sistem kontrak dan outsourcing menciptakan rasa tidak aman di kalangan pekerja. Buruh berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi karena memiliki daya tawar yang terbatas dalam hubungan kerja. Sementara itu, dari perspektif community security, rendahnya kesejahteraan pekerja dapat berdampak pada keluarga dan komunitas yang lebih luas, termasuk menurunnya kualitas pendidikan anak, terbatasnya akses terhadap layanan sosial, serta meningkatnya ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Menyadari berbagai dampak tersebut, berbagai pihak telah menawarkan solusi untuk mengurangi ketimpangan upah dalam industri garmen global. Pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan upah minimum, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan standar ketenagakerjaan, serta memperluas akses pekerja terhadap perlindungan sosial. Di tingkat internasional, organisasi seperti International Labour Organization terus mendorong penerapan prinsip decent work dan perlindungan hak-hak pekerja dalam rantai produksi global. Sementara itu, perusahaan multinasional mulai didorong untuk menerapkan praktik ethical sourcing, meningkatkan transparansi rantai pasok, dan memastikan bahwa pemasok mereka memberikan upah yang layak kepada pekerja.

Namun demikian, implementasi berbagai solusi tersebut masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Kepentingan ekonomi perusahaan untuk menjaga efisiensi biaya sering kali berbenturan dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja. Selain itu, ketergantungan negara berkembang terhadap investasi asing menyebabkan pemerintah tidak selalu memiliki ruang yang cukup besar untuk menerapkan kebijakan yang lebih progresif dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ketimpangan upah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, organisasi internasional, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya dipandang sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam era globalisasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan upah dalam industri garmen global merupakan persoalan sistemik yang berakar pada struktur rantai produksi global yang tidak setara. Posisi negara berkembang seperti Indonesia, Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja sebagai pusat produksi padat karya dalam sistem global supply chain menempatkan buruh pada posisi yang paling rentan secara ekonomi. Perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi melalui mekanisme subkontrak dan outsourcing internasional mampu menekan biaya tenaga kerja secara sistemik dengan memanfaatkan kompetisi antarnegara berkembang dalam menarik investasi asing, yang pada gilirannya menciptakan fenomena race to the bottom dalam standar upah dan kondisi kerja (Gereffi & Mayer, 2004; ILO, 2016).

Dari perspektif human security, ketimpangan upah dalam industri garmen terbukti berdampak negatif terhadap berbagai dimensi keamanan manusia. Secara ekonomi, rendahnya upah membatasi kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong mereka ke dalam siklus kemiskinan antargenerasi. Dari sisi kesehatan, beban kerja yang berat, jam kerja panjang, dan keterbatasan akses layanan kesehatan berkontribusi pada deteriorasi kesehatan fisik dan mental buruh garmen (UNDP, 1994; Hossain & Khan, 2020). Dari dimensi keamanan personal, sistem kerja kontrak dan outsourcing menciptakan ketidakpastian kerja yang tinggi, sementara buruh perempuan secara khusus menghadapi kerentanan berlapis berupa diskriminasi upah dan risiko kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja (ILO, 2019).

Penyelesaian persoalan ketimpangan upah dalam industri garmen global memerlukan pendekatan multidimensi dan kolaboratif. Di tingkat nasional, pemerintah perlu memperkuat regulasi upah minimum yang berbasis kebutuhan hidup layak, meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, dan memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja informal dan kontrak. Di tingkat internasional, penguatan mekanisme due diligence wajib bagi perusahaan multinasional terkait standar ketenagakerjaan dalam rantai pasok mereka menjadi kebutuhan mendesak, sebagaimana tercermin dalam inisiatif seperti UN Guiding Principles on

Business and Human Rights (OHCHR, 2011). Serikat pekerja perlu diberi ruang yang lebih luas untuk bernegosiasi, dan gerakan konsumen global dapat berperan dalam mendorong praktik ethical sourcing melalui tekanan pasar. Hanya melalui sinergi berbagai aktor inilah ketimpangan upah dalam industri garmen dapat diatasi secara bermakna dan human security buruh di negara berkembang dapat terwujud secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Barrientos, S., Gereffi, G., & Rossi, A. (2011). Economic and social upgrading in global production networks: A new paradigm for a changing world. *International Labour Review*, 150(3–4), 319–340. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00119.x>
- Clean Clothes Campaign. (2019). *Stitched up: Poverty wages for garment workers in Asia*. Amsterdam: Clean Clothes Campaign. Retrieved from <https://cleanclothes.org/resources/publications/stitched-up>
- Gereffi, G., & Mayer, F. (2004). The demand for global governance. Terry Sanford Institute of Public Policy Working Papers, Duke University. Retrieved from <https://sanford.duke.edu/articles/demand-global-governance>
- Hossain, N., & Khan, Z. R. (2020). Unsafe garments: Gender, labour rights, and corporate social responsibility in Bangladesh. *Development and Change*, 51(5), 1382–1408. <https://doi.org/10.1111/dech.12564>
- International Labour Organization. (2014). *Wages and working hours in the textiles, clothing, leather and footwear industries*. Geneva: International Labour Office.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan ketenagakerjaan Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Mezzadri, A. (2017). *The sweatshop regime: Labouring bodies, exploitation, and garments made in India*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316336526>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2011). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*. New York & Geneva: United Nations.
- Palpacuer, F. (2008). Bringing the social context back in: Governance and wealth distribution in global commodity chains. *Economy and Society*, 37(3), 393–419. <https://doi.org/10.1080/03085140802172670>
- Ruwanpura, K. N., & Wrigley, N. (2011). The costs of compliance? Views of Sri Lankan apparel manufacturers in times of global economic crisis. *Journal of Economic Geography*, 11(6), 1031–1049. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbq049>
- Siegmann, K. A., & Langenhove, L. V. (2020). Labour in global value chains: Evidence and policy implications. *Development Policy Review*, 38(4), 468–485. <https://doi.org/10.1111/dpr.12458>
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. London: Bloomsbury Academic.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994: New dimensions of human security*. New York: Oxford University Press.
- Wijaya, A., & Pratiwi, R. (2021). Perlindungan hak buruh perempuan dalam industri garmen Indonesia: Analisis kebijakan dan implementasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 344–367. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2963>
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, DC: The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- Zulkifli, M. (2022). Upah minimum dan kesejahteraan buruh garmen di Indonesia: Tinjauan empiris pasca-pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 45–63.